

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Adrian Sutedi, SH, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukse, Jakarta, 2015.
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Gia Indonesia, Jakarta 2002.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta , 2000.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2018,
- Budiarto Agus, *Tanggungjawab Pendirian Perseroan Terbatas*, Gia, Indonesia, Jakarta, 2002,
- C.S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009,
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2005,
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Fred B. G. Tumbuan, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta kedudukan RUPS dalam Perseroan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995*. Jakarta, 1996.
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.
- H. Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Hadi Setia, *Tunggal, Memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jakarta, Harvindo, 2007.
- I.G.Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Ed. Revisi, Cet 1. Jakarta, 2000.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raih Asa Sukses, Depok, 2009, .
- Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang, Jawa Timur : Banyuwangi Publising, 2007.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, 2018.
- Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Medan, 2000,
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Gia Indonesia, Jakarta. 2011.
- Muhammad Yusron, *Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Indonesia*, 8th ed., 2015.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 200.
- Parasian Simanungkalit, *RUPS Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, 2006.
- R. Soegondo Notosoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1982,
- Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Riyanto Agus, “Perbedaan Prosedur RUPS PT Tertutup Dan Terbuka,” Binus University, 2017
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, PT*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan mengenai bentuk-bentuk perusahaan*, Erisco, Jakarta, 1998,
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2007.
- Sujud Margono, *Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan Atas UU Perseroan Terbatas)*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008.
- Sunarti, “Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Hukum” Universitas Gajah Mada, 2008.
- Tobing Lumban, G. H. S. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Zainal Asikin and L. Wira Pria Suharta, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2020

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. JURNAL

Ayu Bimo Setyo Putri, Itikad Baik Pada Pendaftaran Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan, *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol.8 No.1 Juni 2017.

Dhenok Wahyudi, Perlindungan Pemegang saham Minoritas dan Kreditor berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas nsuatu tinjauan umum, *majalah Hukum Trisakti*, 1995.

Erman Rajagukguk, “Pembaharuan Hukum Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas”, *Makalah, Medan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Swadaya*, 1995.

Henry Lbn Toruan Donald, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020)

Misahardi Wilamarta, “Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance”, *Disertasi Doktor Universitas Indonesia*, Jakarta 2002

Putu Vera Purnama Diana, Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, 2016 -2017.

R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No. 02-Juni 2016,

Sriwati, S. Pengalihan Kekayaan Perseroan Yang Lebih Dari Lima Puluh Persen Jumlah Kekayaan Bersih Perseroan Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Tidak Mencapai Kuorum Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Education And Development*, 2020,

